

ABSTRAK

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah melakukan perubahan terhadap kebijakan akuntansi yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Kota Surabaya melaksanakan sistem akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual sejak tahun 2015. Dimana dalam pelaksanaannya tentu saja tidak terlepas dari hambatan dan kendala. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah Kota Surabaya serta mengetahui hambatan dan kendala yang dialami Kota Surabaya dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah yang berpedoman pada SAP berbasis akrual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya tahun 2015 dan 2016 sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Kendala yang dihadapi pemerintah Kota Surabaya hanya dialami pada tahun 2015 yaitu terkait dengan *mapping* kode akun persediaan, penghitungan penyusutan dan amortisasi, perubahan sistem aplikasi akuntansi dan tenaga akuntan yang belum sepenuhnya memahani sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Kata kunci : Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), basis akrual, Laporan Keuangan Pemerintah, Kota Surabaya